

BAB 2

LANDASAN TEORI

A. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan menurut Edi Suharto berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan).¹ Tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi (*transformation action*) agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.²

Penghasilan menjadi faktor penting untuk perempuan agar memiliki kekuatan dalam posisi tawar dalam setiap pengambilan keputusan di rumah tangga dan di luar rumah tangga termasuk keputusan terkait dengan nasib perempuan itu sendiri.³ Perempuan cenderung memiliki kemandirian apabila mempunyai pendapatan dan kegiatan ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri, meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu

¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: PT Revika Aditama, 2005), hal. 57

² Siti Hasanah, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan* (Simpan Pinjam Syariah Perempuan), Sawwa, volume 9, no 1, (Semarang: 1 Oktober 2013), hal. 75

³ Ibid, hal. 76

berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep dirinya.⁴

Menurut Khofifah Indar Parawansa dalam bukunya *Mungukur Paradigma Menembus Tradisi*, pemberdayaan perempuan adalah agenda bangsa yang secara keseluruhan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Disamping itu, pemberdayaan perempuan perlu disiapkan dan dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu dan berlanjut. Tujuan pemberdayaan perempuan untuk mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan. Hal ini dilakukan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan. *Pertama*, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. *Kedua*, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi.⁵

Adapun pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara:

⁴ Khafifah Indar Parawansa, *Mungukur Paradigma Menembus Tradisi*. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hal. 79

⁵ Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Mizan, 2003), cet. Ke-1, h.35

1. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga.
2. Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan. Sehingga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin.

2. Peran Perempuan Nelayan

Kehadiran perempuan sebagai salah satu potensi pembangunan, dirasakan sudah sangat mendesak, karena pada saat sekarang bangsa Indonesia sedang berada pada suatu momentum yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Partisipasi perempuan secara umum dikelompokkan dalam dua peran yaitu peran tradisi dan peran transisi. Peran tradisi mencakup peran perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga, sedangkan peran transisi meliputi pengertian perempuan sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat, dan masyarakat pembangunan.⁶

Sebagai perempuan dalam rumah tangga khususnya, sangat memperhatikan kegiatan rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak, dan semua pekerjaan yang berhubungan dengan kerumahtanggaan, karena hal ini merupakan kewajiban mereka. Sementara hak perempuan dalam rumah tangga adalah menentukan dan mengatur segala keperluan kerumahtanggaan.

⁶ Ibid, hal. 134

Dalam mengambil keputusan untuk melakukan suatu pekerjaan di luar kegiatan rumah tangga seperti pengrajin, buruh, pegawai, dan lain-lain merupakan hak setiap perempuan dalam membantu pendapatan suami atau menunjang perekonomian keluarga, sehingga untuk itu mereka dapat berjalan selaras dan harmonis, karena semua yang dilakukan adalah untuk menjaga keutuhan keluarga yang merupakan salah satu dari pembinaan keluarga.

Peran perempuan dalam pembangunan pada hakikatnya adalah upaya meningkatkan kedudukan, peranan, kemampuan, kemandirian dan ketahanan mental serta spiritual perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Pembangunan sebagai suatu kegiatan perubahan berencana dan direncanakan memiliki tujuan untuk mengadakan perubahan perilaku (kondisi, efeksi dan keterampilan) positif dari khalayak sasaran pembangunan yang diharapkan dan dirancang untuk dapat menghasilkan kemanfaatan bagi orang banyak, yaitu masyarakat secara keseluruhan.⁷

Sesuai dengan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) arahan tentang kedudukan dan peran perempuan: (1) Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan bangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender; (2) Meningkatkan kualitas dan peran kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam

⁷ Khafifah Indar Parawansa, *Mungukur Paradigma Menembus Tradisi*,....., hal. 15-16

melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Kenyataan yang banyak dijumpai di masyarakat, perempuan melakukan dua peran sekaligus yang terkenal sebagai peran ganda wanita. Mereka berperan di dalam rumah atau sektor domestik sebagai ibu rumah tangga dan juga berperan di luar rumah atau sektor publik. Salah satu strategi adaptasi yang ditempuh rumah tangga nelayan dalam mengatasi kesulitan ekonomi adalah dengan mendorong istri mereka ikut mencari nafkah.

Pada masyarakat nelayan, kaum perempuan tidak banyak terlibat dalam penangkapan ikan. Tetapi mereka terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, yaitu berfungsi sebagai kepala rumah tangga. Karena suami biasanya mencari ikan di laut dalam tempo relatif lama. Sedangkan perempuan nelayan menggantikan peranan suaminya. Mereka berperan dalam usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Peranan perempuan nelayan tersebut, menunjukkan bahwa sumberdaya pribadi yang disumbangkan isteri nelayan dalam rumah tangganya relatif besar, yaitu berupa keterampilan dan tenaga.

3. Kemiskinan Nelayan

Permasalahan utama yang dominan dihadapi oleh keluarga nelayan adalah kemiskinan. Kemiskinan yaitu sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai masalah kesejahteraan muncul dalam berbagai bentuk ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, ketergantungan, dan

keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial.⁸ Begitu banyak pengertian tentang kemiskinan, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa istilah kemiskinan selalu menunjuk pada sebuah kondisi yang serba kekurangan.

Masalah kemiskinan yang sering dihadapi nelayan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sumberdaya keuangan keluarga, manajemen alokasi waktu dan pekerjaan yang kurang efisien, keterampilan pengolahan hasil perikanan yang masih terbatas, dan rendahnya posisi tawar menawar (*bargaining power position*) bagi nelayan kecil yang dikarenakan lemahnya sistem kelembagaan dan keterampilan.

Dilihat dari lingkupnya, kemiskinan nelayan terdiri atas kemiskinan prasarana dan kemiskinan keluarga. Kemiskinan prasarana dapat diindikasikan pada ketersediaan prasarana fisik di desa-desa nelayan, yang pada umumnya masih sangat minim, seperti tidak tersedianya air bersih, jauh dari pasar, dan tidak adanya akses untuk mendapatkan bahan bakar yang sesuai dengan harga standar. Kemiskinan prasarana itu secara tidak langsung juga memiliki andil bagi munculnya kemiskinan keluarga. Karena tersedianya air bersih akan memaksa keluarga untuk mengeluarkan uang untuk membeli air bersih, yang berarti mengurangi pendapatan mereka.

Sedangkan keluarga nelayan masih mempunyai kemampuan yang rendah dalam mengelola keuangan keluarga yang dibuktikan dengan rendahnya perencanaan keuangan dan rendahnya pelaksanaan strategi penghematan

⁸ Khafifah Indar Parawansa, *Mungukur Paradigma Menembus Tradisi*,....., hal. 10

pengeluaran terutama pada saat musim melaut dan sedikit melakukan strategi penambahan pendapatan keluarga.

Munculnya perilaku strategis dalam menghadapi krisis pada rumah tangga dilatarbelakangi oleh kemiskinan yang memaksa mereka untuk keluar dari keadaan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga merupakan hal-hal yang mendorong suatu rumah tangga melakukan *survival strategies*. Keluarga miskin di pesisir hampir selalu melibatkan seluruh anggota keluarganya dalam mencari nafkah sebagai upaya untuk bertahan hidup dan sebagai respon dari kondisi keluarga yang serba kekurangan. Anak-anak pada keluarga miskin memasuki dunia kerja lebih awal dari pada anak-anak pada keluarga berkecukupan. Di samping tenaga kerja anak, tenaga kerja perempuan nelayan juga merupakan asset yang sangat membantu ekonomi keluarga.

Sesungguhnya, ada dua hal utama yang terkandung dalam kemiskinan, yaitu kerentanan dan ketidakberdayaan. Dengan kerentanan yang dialami, orang miskin akan mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi darurat. Ini dapat dilihat pada nelayan perorangan misalnya, mengalami kesulitan untuk membeli bahan bakar untuk keperluan melaut. Hal ini disebabkan sebelumnya tidak ada hasil tangkapan yang biasa di jual, dan tidak ada dana cadangan yang dapat digunakan untuk keperluan yang mendesak. Hal yang sama juga dialami oleh nelayan buruh, mereka merasa tidak berdaya di hadapan para juragan yang telah memperkerjakannya, meskipun bagi hasil yang diterimanya dirasakan tidak adil.

Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Pekerjaan sebagai nelayan secara mendasar banyak mengandung risiko dan ketidakpastian. Adanya risiko dan ketidakpastian ini disarankan untuk disiasati dengan mengembangkan pola adaptasi berupa perilaku ekonomi yang spesifik yang selanjutnya berpengaruh pada pranata ekonomi.

Masyarakat nelayan diharapkan dapat menanggulangi kesulitan dan krisis ekonomi keluarga yang dihadapinya, terutama pada saat peceklik (musim angin barat / tidak melaut). Selain itu, untuk mengatasi kesulitan modal, masyarakat nelayan disarankan untuk mengembangkan suatu mekanisme tersendiri, yaitu sistem modal bersama. Sistem ini memungkinkan terjadinya kerja sama di antara nelayan dalam pengadaan modal, juga menunjukkan terjadinya “pemerataan risiko”.⁹

Pemerataan risiko juga akan terjadi melalui pemberian upah secara bagi hasil, ini memungkinkan kelompok kerja nelayan dapat menikmati keuntungan maupun kerugian secara bersama-sama. Pada masyarakat nelayan yang mengembangkan pola pemilikan individu, sistem bagi hasil, pada kenyataanya dapat mendorong terjadinya akumulasi modal hanya pada kelompok kecil tertentu. Sebaliknya masyarakat nelayan yang mengembangkan kepemilikan kolektif, memungkinkan lebih besarnya perolehan pendapatan. Meskipun demikian, pola pembagian risiko ini akan tetap tumbuh dan berkembang dalam

⁹ Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 13-14

organisasi nelayan, terutama ketika pendapatan ekonomi nelayan tidak teratur.

Hal inilah yang melatar belakangi keterbatasan ekonomi keluarga yang menuntut perempuan nelayan termasuk anak-anak mereka bekerja di daerah pesisir. Bahwa perempuan nelayan harus bekerja dengan motivasi utama mencari tambahan penghasilan dalam usaha memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka yang sepertinya sudah menjadi keharusan.¹⁰ Kondisi ekonomi dimana jumlah kebutuhan yang semakin meningkat dengan bertambahnya anggota keluarga yang memerlukan berbagai kebutuhan baik bersifat primer maupun sekunder. Sementara penghasilan suami yang hanya sebagai nelayan kecil sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Sudah menjadi gejala umum jika perempuan nelayan harus bekerja demi memperoleh pendapatan tambahan untuk mencukupi kebutuhan sosial ekonomi rumah tangganya. Perempuan nelayan bekerja lebih kepada alasan karena kebutuhan ekonomi, bukan berdasarkan pada kesetaraan gender. Sebagai nelayan penghasilan suami hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan dari aktivitas bekerja di laut.

Secara sosial bahwa bekerja tidak sekedar bertahan hidup tetapi juga memerlukan kerukunan tetangga serta tolong menolong dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perempuan nelayan untuk bekerja

¹⁰ Saporinah Sadli, et, all., *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia Akses, Perberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), hal. 189.

pada sektor ekonomi publik yaitu : faktor-faktor penyebab terjadi permasalahan gender adalah tingkat pendapatan laki-laki yang masih rendah menyebabkan tekanan ekonomi keluarga. Tingkat pendapatan yang rendah menjadikan para nelayan hanya terfokus pada upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini terjadi karena laki-laki kurang berusaha dan kurang mendapat akses dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, sosial budaya yang tidak berpihak kepada akses perempuan.

Karena itulah potensi yang demikian itu akan bernilai apabila manusia berusaha untuk memanfaatkannya, dengan demikian untuk mengembangkan dan penggalan sumberdaya laut yang tersedia itu diperlukan adanya sumberdaya manusia yang terampil. Ketersediaan sumberdaya laut untuk dikelola, memberi peran perempuan nelayan untuk bekerja disektor ekonomi publik. Berbagai jenis hasil laut dapat diolah menjadi bahan makanan yang mempunyai nilai jual yang tinggi, hasil tangkapan nelayan yang tidak dapat dijual dalam bentuk segar diolah menjadi ikan asin, terasi, dan kerupuk ikan.¹¹

4. Kebijakan Pembangunan Perikanan

Potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dapat di bagi menjadi tiga kelompok, yaitu (1) sumber daya dapat pulih (*renewable*

¹¹ Ono Surono, *Koperasi Nelayan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*,....., hal. 163.

resources); (2) sumber daya tak dapat pulih (*non-renewable resources*), dan (3) jasa-jasa lingkungan (*environmental services*).¹²

Sumber daya dapat pulih terdiri atas hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan padang rumput, serta sumber daya perikanan laut. Sumber daya tidak dapat pulih meliputi seluruh mineral, dan geologi. Wilayah pesisir juga memiliki berbagai macam jasa lingkungan yang sangat potensial bagi kepentingan pembangunan dan bahkan kelangsungan hidup manusia. Jasa-jasa lingkungan yang dimaksud meliputi fungsi kawasan pesisir sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, dan lain-lain.

Tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir di Indonesia umum secara umum antara lain (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha; (2) pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan dan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir; (3) peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan; dan (4) peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir.

Kebijakan pembangunan perikanan didasarkan pada landasan pemahaman yang benar tentang permasalahan mikro sampai pada permasalahan di tingkat makro yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat nelayan. Permasalahan

¹² Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*,....., hal. 2-4

mikro yang dimaksud adalah persoalan internal masyarakat nelayan dan petani ikan menyangkut aspek sosial budaya. Aspek ini yang memengaruhi sifat dan karakteristik masyarakat nelayan. Kelompok masyarakat ini memiliki sifat unik berkaitan dengan usaha yang dilakukan.

Adapun permasalahan perikanan di Indonesia adalah sebagai berikut. *Pertama*, dalam memproduksi komoditas perikanan yang berdaya saing tinggi, baik melalui usaha penangkapan maupun usaha budi daya, masih rendah. Demikian halnya dengan produksi budi daya perikanan di kolam air tawar, tambak dan di laut, masih sering mengalami kegagalan panen.

Kedua, memasarkan produk dengan harga yang menguntungkan atau menyejahterakan produsen (nelayan dan petani ikan) baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor masih juga lemah. Harga jual produk-produk perikanan sangat mudah berubah (fluktuatif), dan sering kali mengalami *market glut*, yakni sesuatu kondisi pasar harga jual yang komoditasnya menurun drastis ketika pasokan (*supply*) komoditas tersebut melimpah (hasil tangkapan ikan sedang baik) dan harga jual membaik manakala pasokannya kecil (sedang paceklik). Kondisi ini turut mengakibatkan nelayan atau petani ikan terjebak dalam kemiskinan. Ketiga, faktor-faktor produksi seperti bahan bakar, alat tangkap (jaring), mesin kapal, pakan ikan atau udang dan lainnya relatif mahal dan bersifat fluktuatif.¹³

Sampai saat ini kebijakan pemerintah di bidang bisnis perikanan dinilai secara umum belum mendukung kemajuan pembangunan perikanan. Minimal

¹³ Ibid, hal. 30-31

ada tiga kelemahan kebijakan yang mendasar. *Pertama*, belum ada kebijakan yang membatasi jumlah (tingkat atau *quota*) penangkapan stok ikan di suatu kawasan perairan (laut). Semua nelayan secara bebas dapat menangkap di suatu wilayah perairan. Akibatnya terjadi *overfishing* yang dapat merugikan nelayan tangkap dan nelayan menjadi miskin.

Kedua, belum ada tata ruang yang mengakomodasi lahan usaha budi daya perikanan sebagai kawasan khusus atau tertentu yang mendapat perlindungan konversi dan bahaya pencemaran, serta pengaturan penjarangan (*spacing*) usaha budi daya perikanan di suatu kawasan. *Ketiga*, belum ada kebijakan tentang kredit murah dan lunak, misalnya bunga sekitar sepuluh persen seperti KUT, untuk mendukung usaha perikanan tangkap, budidaya maupun industri pengolahan.

Namun demikian di balik persoalan tersebut sebenarnya ada persoalan yang mendasar yaitu persoalan sosial dalam konteks makro menyangkut ketergantungan sosial (*patron client*). Persoalan inilah yang seharusnya menjadi faktor perhatian pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan. Semestinya ada instrumen kebijakan yang mampu secara efektif mengurangi sistem sosial yang tidak memungkinkan nelayan kecil keluar dari lingkungan kemiskinan.¹⁴

Implikasi langsung terhadap peningkatan pertumbuhan penduduk adalah makin meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup sementara potensi sumber daya alam di darat yang kita miliki sangatlah terbatas. Hal tersebut mendorong kita

¹⁴ Ono Surono, *Koperasi Nelayan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*,....., hal. 106

untuk mengalihkan alternatif potensi sumber daya alam lain yang kita andalkan yaitu kelautan. Ada lima potensi kelautan yang dapat kita andalkan yaitu potensi perikanan, potensi wilayah pesisir, potensi sumber daya mineral, potensi pariwisata, dan potensi transportasi laut.¹⁵

5. Kendala Pemberdayaan Perempuan

Kebijakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan selama ini dapat dikatakan belum berhasil menyelesaikan permasalahan kemiskinan nelayan secara mendasar. Modernisasi perikanan belum mampu menghapus kemiskinan di masyarakat nelayan. Selain itu, faktor keamanan di laut masih kurang terlindungi. Adapun kendala para nelayan yang sering terjadi dapat di bedakan menjadi beberapa faktor. Diantaranya adalah:

a. Rendahnya Kualitas Sumber Daya

Potensi sumber daya alam di wilayah Pantai Selatan Jawa Timur meliputi potensi sumber daya pesisir, laut, dan perikanan. Kawasan pesisir memiliki hutan alam dan pemandangan yang indah. Gelombang laut yang besar dan gulung-gulung juga merupakan daya tarik alam yang menajutkan.¹⁶ Sumber daya pesisir memiliki fungsi penting bagi ekosistem global di Indonesia memiliki daerah pesisir yang sangat luas.

Namun karena rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat maka produk laut yang dihasilkan hanya sedikit. Hal ini disebabkan karena

¹⁵ Ono Surono, *Koperasi Nelayan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*,....., hal. 107

¹⁶ Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelayan*,....., hal 79-80

masih rendahnya sumber daya nelayan. Sementara itu, akselerasi peningkatan ekonomi mereka lemah, akibat dari kurangnya akses informasi, teknologi, dan modal yang diberikan. Setiap kali keuntungan nilai tambah produksi hanya dinikmati oleh “pemain-pemain besar” yang terjun di sektor perikanan. Sangat disayangkan jika hal seperti ini terus terjadi karena bisa kita lihat bahwa Indonesia kaya dengan sumber daya alam, jika tidak dimaksimalkan maka kemiskinan akan terus meluas.

b. Rendahnya Pendidikan Nelayan

Pendidikan yang dimiliki anak nelayan pada umumnya rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan orang tua dan persepsi orang tua terhadap pendidikan tinggi. Nelayan menganggap pendidikan bukanlah merupakan kebutuhan yang paling utama. Sebagai seorang nelayan yang dibutuhkan hanya keterampilan dan kerja keras, bagaimana memperoleh tangkapan yang melimpah serta menjualnya dengan harga tinggi.

Pendidikan adalah hal pokok sebagai kewajiban setiap orang untuk memperoleh pendidikan yang layak walaupun pada akhirnya bekerja tidak sesuai dengan jurusan. Pemerintah menerapkan pendidikan 12 tahun untuk setiap warganya, namun tidak semua orang peduli dengan pendidikan. Di sisi lain pendidikan sangat diperlukan nelayan sebagai contoh disaat melaut seseorang nelayan harus mengetahui arah angin, proses jual beli ikan, dan mengawetkan ikan.

Biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan anak-anak nelayan adalah biaya mondok di Pesantren karena biayanya lebih murah. Dengan pengeluaran biaya pendidikan yang murah menjadi harapan para nelayan, khususnya nelayan-nelayan tradisional karena bisa menyesuaikan dengan fruktusi pendapatan melaut, yang kadang-kadang juga tidak memperoleh hasil tangkapan sedikit.¹⁷

Alasan orang tua nelayan tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi karena orang tua menganggap bahwa anak harus meneruskan pekerjaan orang tua, selain itu disebabkan karena susah mencari pekerjaan. Pola pikir yang masih sempit membuat kehidupan nelayan semakin terpuruk. Karena nelayan beranggapan pekerjaan menangkap ikan merupakan pekerjaan turun tenurun yang tidak memerlukan status pendidikan tinggi.¹⁸

c. Cuaca Tidak Menentu

Kondisi tergantung pada musim juga sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Kondisi lain yang turut berkontribusi memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. Kendala yang sering terjadi adalah pola hidup konsumtif, di mana ketika memperoleh penghasilan banyak digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder, tidak untuk persiapan ketika

¹⁷ Kunadi, *Jaminan Sosial Nelayan*,....., hal 98

¹⁸ Ono Surono, *Koperasi Nelayan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*,..... hal 30

memasuki masa paceklik. Kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan terjadi disebabkan karena masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya.

Pada musim paceklik (masa tidak ada tangkapan), yang biasanya terjadi pada musim Barat (Desember-Januari), desa-desa nelayan menghadapi masa yang sepi, sedangkan pada bulan-bulan lainnya dinamika sosial ekonomi masyarakat nelayan bisa dirasakan.¹⁹ Musim paceklik yang selalu datang tiap tahunnya dan lamanya pun tidak dapat dipastikan akan semakin membuat masyarakat nelayan harus berada dalam keterpurukan ekonomi setiap tahunnya.

Dengan memperhatikan fruktifikasi produktivitas karena kondisi musim dan iklim, sumber daya perikanan merupakan potensi yang sangat menentukan eksistensi sebuah desa nelayan. Desa nelayan akan tetap ada jika sumber daya perikanan laut yang terkandung di perairan setempat masih memberikan kehidupan kepada nelayan sehingga musim paceklik merupakan hal biasa.

Pada masa sekarang dampak yang terjadi terhadap masyarakat nelayan adalah berkurangnya pendapatan mereka atau tidak memperoleh sama sekali sehingga kondisi demikian menghadapkan rumah tangga mereka pada kesulitan hidup. Untuk itu, kemampuan sumber daya perikanan memberi kehidupan masyarakat nelayan tidak hanya berperan strategis

¹⁹Ibid, hal 63

dalam menentukan keberadaan sebuah desa nelayan, tetapi juga menjaga kelangsungan hidup masyarakat.²⁰

d. Rendahnya Pemanfaatan Teknologi.

Dapat dipahami, jika ketergantungan nelayan terhadap teknologi penangkapan itu sangat tinggi. hal tersebut disebabkan selain kondisi sumber daya perikanan yang bersifat *mobile*, yaitu mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lai, juga untuk menangkapnya nelayan perlu sarana bantu untuk dapat bertahan lama hidup di atas air.

Pada umumnya para nelayan masih mengalami keterbatasan teknologi penangkapan. Dengan alat tangkap yang sederhana, wilayah opsipun menjadi terbatas, hanya disekitar perairan pantai. Di samping itu, nelayan tidak bisa menghadapi kondisi alam, karena alam tidak akan bisa dilawan. Hal yang bisa dilakukan dalam menghadapi adalah perlunya masyarakat nelayan memiliki penguasaan dalam aspek informasi, cuaca dan lokasi. Nelayan di berbagai wilayah membutuhkan membutuhkan dukungan yang konkret dari berbagai pihak mengenai prediksi cuaca dan lokasi mana berkemungkinan terjadi badai sehingga lokasi di laut dapat dihindari, dan alternatif wilayah tangkapan yang relatif aman didapatkan.

Selain rendahnya teknologi penangkapan yang dimiliki oleh nelayan pada umumnya, hal lain yang dihadapi nelayan adalah tidak semua nelayan memiliki alat tangkap. Bagi nelayan yang demikian, tidak ada alternatif lain

²⁰ Ibid, hal 64

kecuali harus bekerja pada orang lain yang membutuhkan tenaganya yaitu menjadi buruh nelayan.

Kemampuan untuk meningkatkan peralatan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seorang nelayan. Sesuai dengan kondisi ekonominya, peralatan yang mampu dibeli adalah peralatan yang sederhana, atau bahkan mungkin tidak mampu membeli peralatan tangkap sama sekali sehingga menempatkan kedudukannya tetap sebagai buruh nelayan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan variasi alat tangkap yang dimiliki bukan bukan hal yang mudah dilakukan. Akibatnya, kemampuan untuk melakukan atau meningkatkan hasil tangkapan menjadi sangat terbatas. Kondisi ini mengakibatkan nelayan mengalami kesulitan untuk dapat melepaskan diri dari kemiskinan karena kemiskinan dialami oleh para nelayan tersebut telah menjadi semacam “lingkaran setan”.²¹

6. Hasil Pemberdayaan Perempuan Nelayan

Kendala kemiskinan menjadi hambatan utama dalam pemberdayaan perempuan, dalam upaya mengimbangi kendala tersebut diperlukan adanya perubahan paradigma dalam pembangunan.²² Untuk mengentaskan kemiskinan para nelayan miskin, pemerintah telah melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).²³ Program PEMP ini

²¹ Mulyadi, *Ekonomi Kelutan*,.....,hal.49-51

²² Khafifah Indar Parawansa, *Mungukur Paradigma Menembus Tradisi*,....., hal. 86.

²³ Kusnadi, *Polemik Kemiskinan Nelayan*,....., hal. 33

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan ekonomi dan kelembagaan sosial. Dalam *position paper* pemberdayaan masyarakat pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan disebutkan, bahwa berdasarkan karakteristik masyarakat pesisir (nelayan) dan cakupan pemberdayaan, maka pemberdayaan nelayan patut dilakukan secara komprehensif. Pembangunan yang komprehensif, yakni pembangunan dengan memiliki ciri-ciri²⁴:

- a. Berbasis lokal (melibatkan sumberdaya lokal sehingga *return to local resource* dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Sumberdaya lokal yang patut digunakan adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya alam,
2. Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan (menitikberatkan kesejahteraan masyarakat dan bukannya peningkatan produksi),
3. Berbasis kemitraan (kemitraan yang mutualistis antara orang lokal atau orang miskin dengan orang yang lebih mampu, untuk membuka akses terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik atau profesional, serta pergaulan bisnis yang lebih luas.
4. Secara holistik atau multi aspek (pembangunan mencapai semua aspek, setiap sumberdaya lokal patut diketahui dan didayagunakan), dan

Program PEMP yang dibentuk oleh pemerintah pusat memberikan dampak yang positif bagi para nelayan miskin di daerah pesisir. Beberapa aspek yang berubah setelah adanya pemberlakuan program ini antara lain seperti aspek

²⁴Rajab Ali Akbar, "Strategi Pemberdayaan Nelayan Miskin", dalam <http://www.kompasiana.com/2016/01/12> di akses tgl. 03 Maret 2017

pendapatan para nelayan. Tidak hanya melalui PEMP, pemberdayaan masyarakat pesisir terutama para nelayan miskin juga bisa dilakukan dengan bentuk-bentuk program lainnya yang berasal dari pemerintah ataupun dari komunitas nelayan itu sendiri.²⁵ Beberapa aspek yang bisa diperhatikan dan dijadikan prioritas dalam perencanaan dan formulasi strategi pemberdayaan nelayan miskin antara lain seperti:

a) Pengembangan akses permodalan.

Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya, pemasalahan utama yang selalu dirasakan menjadi factor utama penghambat dalam menaikkan taraf ekonomi para nelayan miskin adalah sulitnya memperoleh modal untuk pengembangan teknologi dan skala usahanya. Pemerintah bisa mengalokasikan dana yang lebih besar untuk memberikan modal kepada para nelayan, dikarenakan masih tingginya ketidak inginan bank di Indonesia untuk menyediakan modal bagi usaha perikanan para nelayan.

b) Pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan.

Teknologi yang digunakan nelayan pada umumnya masihlah teknoogi yang sederhana. Penggunaan teknologi yang masih sederhana ini kemudian berdampak pada rendahnya pendapatan mereka. Diperlukan upaya yang lebih dalam meningkatkan pendapatan lewat perbaikan teknologi dan penggunaan teknologi yang lebih modern. Bila mana telah diberlakukan penggunaan teknologi yang lebih modern dan efektif, pemberdayaan tersebut harus terus dilanjutkan dan disesuaikan dengan karekteristik dan

²⁵ Ibid, hal. 34

kebutuhan nelayan, baik dari segi kapasitas kemampuan dan keterampilan sumberdaya mereka.

c) Pengembangan akses pemasaran.

Pasar adalah faktor penting dalam menjalankan usaha. Tidak adanya pasar dan strategi pemasaran bisa menjadi kendala utama sebuah usaha apabila tidak berkembang. Oleh karenanya, pemerintah harus membuka dan memberikan akses yang lebih luas lagi dalam pemasaran hasil tangkapan para nelayan miskin. Perbaikan sistem dan pengembangan akses pemasaran merupakan salah satu hal yang penting dipertimbangkan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir oleh pemerintah daerah, sehingga para nelayan miskin bisa bersaing dengan para nelayan kaya dan pemilik modal lainnya.

d) Penguatan kelembagaan para nelayan dan masyarakat pesisir.

Penguatan kelembagaan di kalangan masyarakat nelayan dapat membangun aksi solidaritas sosial dan kolektifitas masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok yang meninjau kebutuhan mereka. Melalui kelembagaan masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar masyarakat pesisir secara sosial dan ekonomi, serta menjadi sebuah pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri. Peran pemerintah pusat dan daerah bisa diposisikan dalam kegiatan-kegiatan manajerial dalam memberikan wawasan, pengetahuan dan keterampilan, serta pendidikan mengenai manajemen usaha perikanan. Harapannya lewat kelembagaan yang kemudian terbentuk adalah mendorong modal sosial para

nelayan sehingga lebih memiliki kekuatan secara sosial dan ekonomi yang mandiri. Pembinaan dan pelatihan diperlukan sebagai peran penting pemerintah untuk menciptakan masyarakat nelayan yang mandiri pada akhirnya.

e) Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan diakomodasi dalam manajemen perikanan partisipatori. Manajemen ini dapat berupa manajemen berbasis. Manajemen berbasis masyarakat berfokus pada masyarakat, sedangkan ko-manajemen merupakan kemitraan antara pemerintah, masyarakat serta pengguna sumberdaya lainnya. Pengelolaan berbasis masyarakat akan lebih optimal direalisasikan dengan pendekatan konsep *co-management*. *Co-management* adalah konsep manajemen pengelolaan bersama, artinya pelbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) setuju saling berbagi peran dalam pengelolaan, hak dan tanggung jawab, atas suatu kawasan atau sumberdaya alam yang dimaksud. Dengan tujuan utama agar pengelolaan lebih tepat, efisien, adil dan merata.

f) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan.

Sarana dan prasarana merupakan factor penting dalam menunjang usaha perikanan para nelayan miskin. Saran dan prasarana merupakan sebuah urat nadi dari berbagai macam kegiatan dan usaha. Minimnya saran dan prasarana yang dimiliki oleh para nelayan miskin di daerah pesisir yang masih tertinggal sangat mempengaruhi perkembangan usaha mereka.

Pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas nelayan untuk melihat keadaan dan kemudian memberikan bantuan pembangunan saran dan prasarana penunjang bagi nelayan.

B. EKONOMI KELUARGA

1. Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga merupakan salah satu unit kajian ekonomi pada unit paling kecil (keluarga) dari sistem ekonomi yang lebih besar, misal perusahaan dan negara. Kajian ekonomi keluarga membahas tentang bagaimana keluarga menghadapi masalah kelangkaan sumber daya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan akan barang dan jasa, sehingga keluarga dituntut mampu menentukan pilihan berbagai macam kegiatan (pekerjaan) guna mencapai tujuan.

Istilah keluarga dan rumah tangga cukup sulit untuk dibedakan. Menurut Bryant rumah tangga adalah mereka yang tinggal bersama, menggunakan sumber daya kolektif untuk mencapai tujuan. Sementara keluarga adalah orang-orang yang memiliki ikatan sosial-biologis melalui pernikahan, kelahiran atau adopsi, dan menggunakan sumber daya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.²⁶

Istilah ekonomi keluarga harus didahului dengan penjelasan tentang konsep ekonomi. Ekonomi sebagai disiplin ilmiah (ilmu), termasuk kedalam ilmu sosial yang mengkaji masalah utama, yakni kelangkaan, suatu kondisi

²⁶ Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hal. 1-4

yang disebabkan oleh kombinasi yang tidak seimbang antara keinginan yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Dengan kajian ekonomi , rumah tangga merasa terbantu menentukan pilihan yang terbaik bagi rumah tangga. Para ekonom memandang keluarga sebagai lembaga ekonomi selain organisasi formal seperti perusahaan, lembaga pemerintah, bank, serikat pekerja, dan koperasi. Kajian ekonomi keluarga merupakan kajian ekonomi yang dikhususkan pada keluarga, bukan pada lembaga ekonomi lain.

Mengingat sumber daya dapat digunakan keluarga terbatas, ekonomi keluarga mengkaji bagaimana cara mengambil keputusan dan menentukan pilihan dari berbagai cara yang diambil. Pada saat keluarga hidup dalam situasi kelangkaan sumber daya, maka keluarga harus mengetahui cara menggunakan sumber daya dan menentukan pilihan yang bijaksana. Kelangkaan sumber daya berdampak besar pada setiap pengambilan keputusan yang akan dan telah dibuat oleh keluarga. Dari kondisi itulah, kajian ekonomi keluarga hadir untuk mempelajari bagaimana keluarga mencoba memenuhi kebutuhan yang “tak terbatas” dan bersaing untuk menggunakan sumber daya yang relatif langka dengan baik.²⁷

Dalam ekonomi keluarga, sumber daya hanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya fisik dan sumber daya manusia. Sumber daya alam dan sumber daya finansial, masing-masing sebagai kategori tersendiri. Dalam ekonomi rumah tangga, sumber daya alam dan finansial dimasukkan ke dalam satu kategori yang disebut sebagai sumber daya fisik.

²⁷ Ibid,hal.8-13

Ekonomi umum, “tanah” mengacu pada “lingkungan fisik” atau sering disebut sumber daya alam, atau sumber daya yang tidak di buat oleh manusia. Tanah meliputi gurun, ladang subur, hutan, tambang, ternak, sinar matahari dan iklim. Begitu banyak sumber daya yang tersedia, tetapi hanya pada waktu tertentu saja. Untuk itu, para ekonom membagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya, tidak cukup tersedia lahan pertanian yang dapat memberi makanan semua penduduk atau pantai yang cukup dinikmati orang saat bertamasya atau cukup minyak dan mineral untuk memenuhi kebutuhan energi yang dapat memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Sedangkan sumber daya manusia diantaranya waktu, keahlian dan energi dari setiap anggota rumah tangga. Waktu dari setiap anggota rumah tangga bersifat unik dan tidak dapat diperbaharui.

2. Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan Keluarga merupakan wadah untuk membina kehidupan bermasyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan yang dapat menghasilkan sinergi untuk keluarga sejahtera yang mandiri dengan meningkatkan mental spiritual perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila.

Hal tersebut dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan berbagai upaya atau usaha dan kegiatan, seperti meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan, ikut mengupayakan dalam kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, meningkatkan derajat kesehatan kelestarian hidup serta membiasakan

hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.²⁸ Kesejahteraan keluarga pada intinya mencakup konsepsi antara lain, yaitu : “Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial”.

Pengertian seperti ini, menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dengan demikian, prioritas utama pembangunan kesejahteraan adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung, khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan.²⁹

Di dalam rangka membangun keluarga sejahtera yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, maka suami dan isteri harus melaksanakan peranan dan atau fungsi sesuai dengan kedudukannya. Dengan demikian, keluarga akan merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat yang bukan hanya berfungsi sosial budaya, tetapi juga berfungsi ekonomi. Apabila tekanan fungsi keluarga secara tradisional adalah fungsi reproduktif - yang dari generasi ke generasi mengulangi fungsi yang sama – kemudian telah berkembang ke fungsi sosial budaya. Namun, belakangan ini keluarga diandalkan untuk suatu tugas yang

²⁸ Sutedjo, *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*, (Jakarta: Azka Press, 2005), hal.1-2

²⁹ Benny Soembodo, *Kesejahteraan Keluarga (Pandangan Masyarakat Miskin Perkotaan Mengenai Kesejahteraan Sosial)*, (Unair: Dosen Departemen Sosiologi) hal 4-5

lebih luhur yaitu, sebagai wahana mencapai tujuan pembangunan. Hal ini menyebabkan keluarga perlu mempersiapkan diri dalam keterlibatannya sebagai agen pembangunan di sektor ekonomi produktif.

Menurut Soetjipto, kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk di atasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud. Konsepsi tersebut mengandung arti bahwa, kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi yang harus diciptakan oleh keluarga dalam membentuk keluarga yang sejahtera. Adapun keluarga sejahtera merupakan model yang dihasilkan dari usaha kesejahteraan keluarga.

C. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

1. Pemberdayaan Perempuan Menurut Perspektif Islam

Pemberdayaan perempuan menurut perspektif Islam adalah upaya pencerdasan muslimah hingga mampu berperan menyempurnakan seluruh kewajiban dari Allah SWT, baik di ranah domestik maupun publik. Kesalahan aktivitas perempuan diarahkan. Kesuksesan seorang perempuan di sector domestik (rumah tangga) di tandai dengan berperannya perempuan dalam mengatur rumah tangga sesuai dengan aturan yang telah Allah turunkan.

Perempuan yang mendidik anak-anaknya dan mengatur urusan rumah tangganya.³⁰

Di Indonesia keberadaan perempuan yang jumlahnya lebih besar dari laki – laki membuat pendekatan pemberdayaan dianggap suatu strategi yang melihat perempuan bukan sebagai beban pembangunan melainkan potensi yang harus dimanfaatkan untuk menunjang proses pembangunan. Pembangunan yang menyeluruh menuntut adanya peran serta laki-laki dan perempuan di segala bidang. Perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan. Dengan demikian, perempuan sama halnya dengan laki-laki dapat menjadi sumber daya fisik lainnya sebagai penentu tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur dan sejahtera. Dalam hal ini Mahmud Syaltut menulis:

“Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir (dapat didapatkan) sama, Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki potensi dan kemampuan yang cukup agar masing-masing dapat memikul tanggung jawabnya, sehingga kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus”. Sebagaimana dalam surah Al-Nisa’ ayat 34 yang artinya:

الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا
من اموالهم فالصلحت قنتت حفظت للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوز

³⁰ Siti Muslikati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan*,....., hal.127

هن فعظو هن واهجرو هن فى المضاجع واضربو هن فان اطعنكم فلا تبغوا
عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا

Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita , karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Maka dari itu, wanita yang salihah ailah yang taan kepada Allah SWT memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, dan jauhilah mereka ditempat tidur, dan pukullah mereka. Jika mereka mentaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat ini menegaskan bahwa berbicara tentang kepemimpinan laki-laki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak perempuan dalam berbagai segi, termasuk dalam hak kepemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.³¹

Keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka arti dalam berbagai aktifitas. Para perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri maupun bersama

³¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 428.

orang lain, dengan lembaga keuangan maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya,serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa “perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya, selama mereka membutuhkan pekerjaan dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi cukup beraneka ragam, misalnya Ummu Salim binti Malhan bekerja sebagai perias pengantin pada masa Nabi. Istri Nabi Khadijah binti Khuwailid dalam bidang perdagangan, dan masih banyak lagi contoh menyangkut perempuan yang bekerja dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi.

Seperti halnya kaum perempuan di keluarga nelayan umumnya terlibat dalam aktivitas mencari nafkah untuk keluarganya. Selama ini perempuan nelayan yang mengurus pascapanen yang meliputi pengolahan, pengawetan dan pemasaran.³² Sementara laki-laki pada aspek produksi melalui kegiatan penangkapan ikan dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong partisipasi perempuan lebih baik. Sebagai nelayan kecil atau buruh nelayan penghasilan

³² Ono Surono, *Koperasi Nelayan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*,.....,hal 163.

dari kegiatan melaut bersifat spekulatif dan tidak tentu, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka kaum perempuan pesisir mengambil peranan yang sangat penting.

Biasanya, pekerjaan tersebut tidak bisa ditunaikan semuanya. Dalam waktu yang sama, mereka juga harus merawat dan mendidik anak-anaknya. Selain mengurus suami dan anak sesuai dengan kadar intelektual dan profesinya mereka berkewajiban melakukan pengabdian kepada masyarakat.³³ Agar hal tersebut dapat berjalan beriringan, maka perempuan dapat menentukan manakah dari sekian banyak kemaslahatan yang lebih penting dan harus dipecahkan pertama kali, misalnya dengan skala prioritas. Skala prioritas sebagaimana dijelaskan pada sosiolog menunjukkan bahwa penunaian tugas oleh perempuan atas tanggung jawab mengurus suami dan membahagiakannya serta mendidik anak-anak agar menjadi anak saleh merupakan tingkatan kemaslahatan yang paling tinggi atau merupakan tuntutan skala prioritas primer dalam konsep kemaslahatan masyarakat.

Dihadapkan dari realita ini jika dalam suatu kondisi perempuan dihadapkan kepada tugas dan kewajiban dan rumah tangga serta aktivitas keilmuan dan sosial lainnya, padahal dia tidak sanggup menunaikan keduanya dalam waktu bersamaan, maka yang harus dikerjakan berdasarkan retorika skala prioritas adalah menunaikan tugas dan kewajiban rumah tangga maka hal itu harus mengorbankan kepentingan lainnya.³⁴ Hal ini lebih jelas lagi ketika

³³ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman sistem Barat dan Keadilan Islam*. (Karangasem: Era Intermedia, 2002), hal. 70

³⁴ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman sistem Barat,.....*, hal 71

perempuan bekerja hanya untuk mengejar status sosial atau hanya demi kebanggaan terhadap masyarakat. Dalam kondisi semacam ini, perempuan harus mendahulukan kehidupan, seperti merawat dan mendidik anak-anaknya.

2. Perempuan Bekerja Dalam Pandangan Islam

Jika kembali pada dunia Arab sebelum Islam, kita dapat melihat bahwasannya perempuan Arab waktu itu diperlakukan tidak adil. Mereka kehilangan banyak hak. Perempuan Arab waktu itu tidak mempunyai hak apapun atas suaminya. Pada zaman Jahiliyah, orang-orang Arab merasa pesimis ketika melahirkan anak perempuan. Sebagian bahkan mereka malah mengubur anak itu hidup-hidup karena takut terlihat cacatnya. Sebagian yang lain mengubur anak hidup-hidup dan mengubur anak secara umum karena takut jatuh miskin.³⁵

Tetapi setelah Islam datang perempuan mulai diperhitungkan, pada masa Rasulullah SAW kaum perempuan berperan penting dan ikut serta dalam berbagai kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, Ekonomi, dan politik. Mereka diberikan hak-hak untuk memiliki kekayaan yang tidak dapat disetarakan dengan Barat hingga masa modern ini. Bahkan turut berperang. Karena peran mereka dalam berbagai kegiatan maka setiap orang mengenal istri-istri Nabi SAW, putra-putrinya, bibi-bibinya, dan perempuan-perempuan yang berkedudukan tinggi pada waktu itu. Mungkin hal ini tidak akan terjadi sekiranya mereka dipingit dalam rumah dan tidak berhubungan dengan laki-laki.

³⁵ Siti Mika Nur Aini, "Kebudayaan, Jahiliyah dan Perkembangan Islam", dalam <http://www.kompasiana.com/2015/06/24> di akses tgl 01 Mei 2017

Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagian ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini.³⁶ Islam merupakan agama yang universal, tidak hanya mengatur masalah ekonomi, sosial budaya, perdagangan dan lainnya, tetapi juga mengatur masalah manusia dunia dan akhirat, Islam tidak melarang penganutnya untuk bekerja, asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dalam Islam bekerja merupakan sesuatu hal yang sangat dianjurkan. Apalagi jika dengan bekerja seorang mukmin tidak hanya dapat menghindarkan dirinya dari meminta-minta, tetapi juga dapat menafkahi orang tuanya yang sudah renta dan anak-anaknya yang masih kecil. Beberapa anjuran mengenai bekerja terdapat dalam Surat Al – Mulk ayat 15.

هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه
واليه النشور

Artinya: Dialah Tuhan yang telah menciptakan bumi yang mudah dikuasai untuk kalian, karena itu berjalanlah kalian di segenap penjuru dan makanlah kalian dari rezeki-Nya.(Al Mulk ayat 15)

والى ثمود أخاهم صلحا قال يقوم اعبروا الله ما لكم مم اله غير هو
انشاكم من الارض واستعمر كم فيها فاستغموروه ثم توبوا اليه ان ربي
قريب مجيب

Artinya: Wahai kaumku taatlah kalian kepada Allah, karena tidak ada sesuatu sesembahan bagi kalian selain daripada-Nya. Dialah yang telah

³⁶ Muh said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), hal. 10.

menciptakan kalian dari tanah dan menyuruh kalian mengusahakan kemakmuran di bumi ini. (Hud, ayat 61)

Alloh memberikan berbagai macam kekayaan alam dan muka bumi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan makan, minuman dan lain-lain. Segala bahan yang Alloh telah sediakan di muka bumi ini dengan mudah dapat diraih asalkan mau bekerja dengan keras. Jadi orang mukmin tidak boleh hanya berpangku tangan menghadapi kehidupan.³⁷ Ayat di atas dengan tegas memerintahkan kepada manusia untuk bekerja keras agar mereka dapat hidup makmur. Perintah mengelola bumi untuk kemakmuran menunjukkan bahwa manusia wajib bekerja keras agar mendapatkan rezeki dari Alloh.

Pada dasarnya, ajaran Islam sangat mendorong kepada kaum perempuan untuk berkarya secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan kodratnya. Karena itulah, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan pria dan perempuan mempunyai persamaan hak dan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk menyatakan pendapat dan aspirasinya. Bahkan sebagian mereka ada yang ikut berperang, mendukung tugas pria.

Perempuan yang bekerja di luar rumah harus bisa menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, perempuan yang bekerja tidak boleh sampai

³⁷ Muhammad Thalib, *Membangun Ekonomi Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), hal.234-235

menelantarkan perealisasiian tanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak-anak nya, yang merupakan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi perempuan muslimah.

D. PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian yang dilakukan oleh Edis Miati dengan judul “Partisipasi Perempuan Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. (Studi Pedagang Keliling Ibu Rumah Tanggadi Dusun IV Semeliki Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu)” yang melakukan penelitian pada Kabupaten Indragiri (RIAU), bertujuan untuk mengetahui partisipasi pedagang keliling perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga dan untuk mengetahui analisa ekonomi Islam terhadap partisipasi perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dengan penelitian kualitatif dengan subyek seluruh perempuan yang bekerja sebagai pedagang keliling. Teknik dan cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penyebaran angket, wawancara, menggunakan primer serta data pustaka sebagai data sekunder. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan sebagai pedagang keliling di Semeliki Desa Lubuk Sitarak, sangat membantu dalam menunjang ekonomi keluarga, yaitu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk pendidikan anak-anak. Namun secara aplikasi nilai-nilai Islam ada yang

melaikan tanggung jawab terhadap keluarga dan tidak menutup aurat ketika berjualan.³⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Anita Saraswati dengan judul “Peranan Istri Nelayan Dalam Menunjang Kehidupan Keluarga (Studi Pada Istri Nelayan di Daerah Pesisir Pantai, Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Singaraja.” Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dengan penelitian kualitatif melalui cara pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu pendekatan dengan penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan, bertujuan untuk mengetahui kondisi kehidupan keluarga nelayan di daerah pesisir pantai desa pamaron dan untuk mengetahui bentuk partisipasi istri nelayan dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan menggunakan subyek keluarga nelayan, yaitu suami dan istri nelayan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan metode pencatatan dokumen. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi istri nelayan dalam aktifitas sosial masyarakatan dalam pengambilan suatu keputusan yang baik. Namun partisipasi istri nelayan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.³⁹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Purba Rana Ikhwanul, dkk dengan judul “Peran Ibu Rumah Tangga Nelayan Dalam Upaya meningkatkan perekonomian keluarga di Kelurahan Bitung Karang Ria, Kecamatan Tuminting, Kabupaten

³⁸ Edis Miati, SKRIPSI: “*Partisipasi Perempuan Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*. (Studi Pedagang Keliling Ibu Rumah Tangga Dusun IV Semeliki Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu)”, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif, 2013), hal. 56

³⁹ Putu Anita Saraswati, SKRIPSI: “*Peranan Istri Nelayan Dalam Menunjang Kehidupan Keluarga* (Studi Pada Istri Nelayan di Daerah Pesisir Pantai, Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Singaraja)”, (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2014), hal. 13-14

Manado” yang melakukan penelitian pada Kabupaten Manado, bertujuan untuk mengetahui peranan istri nelayan dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan untuk mengetahui motivasi istri nelayan yang bekerja dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dengan penelitian kualitatif dengan subyek ibu-ibu rumah tangga nelayan dari berbagai usaha teknik pengumpulan data Primer, wawancara, dan sekunder. Penelitian menunjukkan bahwa ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pedagang usaha kantin (penjual nasi kuning, nasi campuur, dan lain-lain) maupun penjual keliling (penjual ikan, sayur, dan lain-lain) maka pendapatan keluarga dapat meningkat. Ibu rumah tangga yang sebagai pedagang kue dalam bentuk pesanan untuk acara-acara tertentu (ibadah, pesta, syukuran, dan lain-lain) maka pendapatan usaha meningkat.⁴⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Arini Mayanfa'uni dengan judul “pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Cempaka Di Rw 02 Kelurahan Petukangan Selatan” yang melakukan penelitian pada Kota Jakarta, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam upaya pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Cempaka. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dengan penelitian kualitatif dengan subyek kelompok tani cempaka. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, studi dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya

⁴⁰ Purba Rana Ikhwanul, et.all., *Peran Ibu Rumah Tangga Nelayan Dalam Upaya meningkatkan perekonomian keluarga di Kelurahan Bitung Karang Ria, Kecamatan Tuminting, Kabupaten Manado*, Acta Diurna, vol. III, no. 4, (Manado, 2014), hal. 15

Kelompok Tani Cempaka perempuan memiliki kesempatan dalam menambah ilmu pengetahuan serta keterampilan.⁴¹

Persamaan penelitian sekarang ini dengan penelitian Edis Miati adalah sama-sama membahas tentang peran dan partisipasi ibu rumah tangga menurut perspektif ekonomi islam. Sementara persamaan penelitian ini dengan penelitian Putu Anita Saraswati adalah sama-sama penelitian yang dilakukan langsung di lapangan yang bertujuan mengetahui kondisi kehidupan keluarga nelayan di daerah pesisir pantai. Sementara persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba Rana Ikhwanul, dkk adalah sama-sama membahas peran istri nelayan yang bekerja dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Sementara persamaan penelitian ini dengan penelitian Arini Mayanfa'uni memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ibu rumah tangga dalam upaya pemberdayaan perempuan.

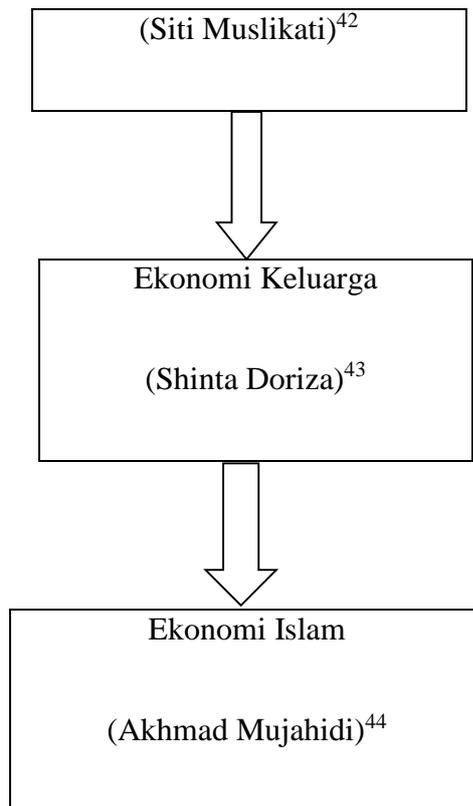
Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang ini terletak di objek penelitian. Objek penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Edis Miati membahas analisa ekonomi Islam terhadap partisipasi perempuan yang bekerja sebagai pedagang keliling dalam menunjang ekonomi keluarga sedangkan penelitian ini membahas peran perempuan nelayan dalam menunjang ekonomi keluarga menurut perspektif ekonomi islam. Sementara perbedaan penelitian Putu Anita Saraswati dengan penelitian ini adalah subyek

⁴¹ Arini Mayanfa'uni, SKRIPSI, "*Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Cempaka Di Rw 02 Kelurahan Petukangan Selatan*". (Jakarta: UIN, 2016), hal. 101

penelitiannya, pada penelitian terdahulu subyek penelitian suami dan istri nelayan, sedangkan pada penelitian ini subyek penelitiannya istri nelayan. Sementara perbedaan penelitian yang dilakukan Purba Rana Ikhwanul, dkk lebih membahas tentang peran istri nelayan yang bekerja dalam berbagai usaha sedangkan penelitian ini membahas peran istri nelayan secara menyeluruh. Sedangkan perbedaan penelitian Arini Mayanfa'uni adalah aplikasi pemberdayaan pada sektor pertanian sedangkan penelitian ini pada sektor perikanan.

E. KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN

Pemberdayaan Perempuan



Dengan adanya Program Pemberdayaan Perempuan Nelayan, maka peranan istri dalam menunjang ekonomi rumah tangga sangat penting. Salah satu peranan tersebut dapat dilihat dari seberapa besar sumbangan pendapatan wanita dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Selain itu, apakah seorang suami mengizinkan istrinya membantu dalam mencari nafkah. Jika hal ini tidak diperbolehkan maka akan bertentangan dengan pemberdayaan perempuan dilihat dari perspektif islam. Karena sesungguhnya seorang istri tidak berkewajiban membantu mencari nafkah. Jika seorang istri membantu bekerja di luar rumah maka harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan kewajibannya di rumah.

⁴² Siti Muslikati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*,.....,hal. 131.

⁴³ Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*,....., hal. 1

⁴⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, , hal. 10